

## **Presidensi G20 Brasil 2024: Saatnya Membangun Dunia yang Adil dan Berkelanjutan**



### **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **SIARAN PERS**

HM.4.6/501/SET.M.EKON.3/12/2023

## **Presidensi G20 Brasil 2024: Saatnya Membangun Dunia yang Adil dan Berkelanjutan**

**Brasilia, 11 Desember 2023**

Presidensi G20 Brasil 2024 mengusung tema “Building a Just World and a Sustainable Planet” untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan utama global yaitu kesenjangan sosial. Untuk mendukung tema besar tersebut, telah ditetapkan tiga prioritas utama yakni pertama, inklusi sosial dan perjuangan melawan kelaparan, kemiskinan, dan kesenjangan, kedua, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dalam tiga aspeknya (sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup), ketiga, menghidupkan kembali multilateralisme dan mendorong reformasi lembaga-lembaga tata kelola global.

Perlu diketahui bahwa Brasil memegang PRESIDENSI G20 terhitung sejak 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024. Pertemuan Sherpa ke-1 PRESIDENSI G20 Brasil 2024 berlangsung 11-12 Desember 2023 di Itamaraty Palace, Brasilia, Brasil. Dalam sambutan pembukanya, Sherpa G20 Brasil, Ambassador Mauricio Carvalho Lyrio, menyampaikan bahwa kesenjangan sosial merupakan masalah global yang belum berhasil diatasi. Ketimpangan pendapatan, akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pangan, gender dan ras, serta keterwakilan merupakan akar dari beberapa masalah masyarakat di seluruh dunia. Jika ingin membuat perbedaan, maka Forum G20 harus menempatkan pengurangan kesenjangan sebagai agenda internasional.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menjadi salah satu wakil Indonesia hadir secara langsung dan menyampaikan dukungan Indonesia terhadap isu prioritas yang diusung oleh PRESIDENSI Brasil. Deputi Edi juga mengapresiasi PRESIDENSI Brasil yang telah

mempertahankan struktur G20 yang ramping dan efektif. Namun, Deputy Edi juga menyampaikan terkait perlunya strategi dalam mengelola isu baru, isu lama, dan permasalahan lintas sektor. Belajar dari pengalaman Presidensi G20 sebelumnya, mengelola isu lintas sektor untuk menghasilkan konsensus itu tidak mudah.

Terkait prioritas pertama yakni inklusi sosial dan perjuangan melawan kelaparan, kemiskinan, dan kesenjangan, Presidensi G20 Brasil mendorong inklusi sosial dan memerangi kelaparan dan kemiskinan merupakan tantangan yang mendesak di seluruh dunia. Kemudian terkait prioritas kedua yakni transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dalam tiga aspeknya (sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup), Presidensi G20 Brasil ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya sekedar memaksimalkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan tidak mengorbankan generasi mendatang. Selanjutnya prioritas ketiga yakni menghidupkan kembali multilateralisme dan mendorong reformasi lembaga-lembaga tata kelola global, Presidensi G20 Brasil mendorong hal ini karena banyak organisasi internasional yang dirancang pada tahun 1940-an, tidak mencerminkan realitas global saat ini.

Turut hadir sebagai perwakilan Indonesia yakni Staf Khusus Menteri Luar Negeri Untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani selaku Co-Sherpa G20 Indonesia. Sebagai informasi, Pertemuan Sherpa ke-1 akan dilanjutkan dengan Pertemuan Gabungan Sherpa dan Deputy Keuangan dan Bank Sentral G20 pada tanggal 13 Desember 2023. Presidensi G20 Brasil akan menyelenggarakan ratusan pertemuan dari tingkat working group, engagement group, pertemuan tingkat menteri, dan puncaknya yakni Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Rio de Janeiro pada 18-19 November 2024. (dep7/ltg)

\*\*\*

**Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Haryo Limanseto**

Website: [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: [humas@ekon.go.id](mailto:humas@ekon.go.id)

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia